

Ketimpangan Distribusi Pendapatan Gorontalo Memburuk

MENURUNKAN ketimpangan merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi, ketimpangan itu sendiri ada dua dimensi, yakni ketimpangan wilayah dan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan wilayah diukur dengan Indeks Williamson, sementara ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan Gini Ratio (Indeks Gini). Secara berkala BPS hanya merilis ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio), sedangkan ketimpangan wilayah jarang dilakukan kecuali keperluan-keperluan riset. Nilai indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa seluruh pendapatan terbagi merata untuk seluruh masyarakat, sedangkan nilai 1 berarti seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh kelompok kecil distribusi sumber daya ekonomi. Ketimpangan yang rendah mempunyai nilai indeks gini 0,4 kebawah, ketimpangan yang tinggi apabila mempunyai indeks gini di atas 0,4 dalam distribusinya.

Ketimpangan wilayah dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan fenomena universal, namun umumnya negara-negara berkembang ketimpangan cenderung lebih tinggi, sementara negara-negara maju cenderung rendah. Perbedaan keduanya diakibatkan banyak faktor, seperti; 1) Kondisi geografis dan demografis, wilayah dengan aksesibilitasnya buruk cenderung tertinggal bila dibandingkan dengan wilayah pusat pertumbuhan. 2) Struktur ekonomi, perekonomian negara berkembang cenderung mengandalkan sektor pertanian (produktivitas rendah) dan sebaliknya negara maju mengandalkan sektor non pertanian (sektor produktif). 3) Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), wilayah yang memiliki kekayaan SDA peluang untuk mengembangkan dirinya akan lebih kuat dibandingkan dengan wilayah yang minim

SDA. Meskipun begitu asumsi ini tidak selamanya tepat, sebab ada negara struktur geografisnya bergunung-gunung namun lebih maju (kesejahteraan merata) dibandingkan dengan negara hamparan datar. Tidak sedikit pula negara kaya SDA tetapi tertinggal secara ekonomi bila dibandingkan dengan negara yang minim SDA. Maka dari itu ketimpangan lebih cenderung terjadi karena faktor struktur ekonomi yang terlalu bertumpu pada sektor ekonomi yang kurang produktif. Kondisi ini dapat diubah lewat intervensi kebijakan (policy), sebab berbagai studi menunjukkan bahwa ketimpangan dapat diatasi melalui kebijakan yang tepat dengan pembangunan berkesinambungan dan inklusif. Ini sejalan dengan hipotesis Kusnetz (atau hipotesis U terbalik), pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan cenderung meningkat atau tidak merata. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak/melebar (divergence). Bila proses pembangunan terus berlanjut maka berangsur-angsur ketimpangan pembangunan tersebut menurun (convergence).

Jika merujuk hipotesis Kusnetz di atas, ketimpangan yang melebar di wilayah "baru" merupakan fenomena yang lazim. Sekalipun hipotesis ini tidak selalu terbukti di semua negara, hanya bagi negara berkembang (Yustisia dan Sugianto, 2014). Sampel studi yang dilakukan oleh Kusnetz memang terbatas hanya 24 negara selama 10 tahun. Oleh sebab itu hipotesis Kusnetz masih perlu dieksperimentasikan dengan berbagai wilayah dengan durasi waktu yang panjang. Namun hipotesis Kusnetz tetap penting dijadikan rujukan dalam mendesain pembangunan, khususnya daerah yang baru berkembang. Meskipun dalam konteks pembangunan Gorontalo justru pada mulanya ketimpangan



Oleh
Muh. Amier Arham

bersifat convergence (rendah), lambat laun ketimpangannya malah melebar. Data BPS menunjukkan di tahun 2002 Gini Rasio Provinsi Gorontalo sebesar 0,253 terus meningkat (convergence), malahan pada tahun 2010 melonjak menjadi 0,431. Jika kriteria gini rasio dirujuk, sejak tahun 2010 ketimpangan distribusi pendapatan di Gorontalo memburuk, di tahun 2015 - 2017 sempat menurun lalu naik kembali per September 2018 sebesar 0,417. Kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan Gorontalo menempatkan daerah ini sebagai provinsi paling timpang kedua di Indonesia Provinsi DIY.

Secara umum kenaikan angka gini rasio dari tahun 2010 berdasarkan daerah tempat tinggal, gini rasio perkotaan lebih tinggi dibanding gini rasio perdesaan. Namun perkembangan gini rasio per September 2018, gini rasio perkotaan sebesar 0,397 sedangkan gini rasio perdesaan 0,413. Di waktu yang sama angka kemiskinan di perdesaan justru mengalami penurunan, per Maret 2018 angka kemiskinan perdesaan di Gorontalo sebesar 24,09 % menurun menjadi 23,86 % per September 2018, jika dihitung per kepala jumlah orang miskin pada bulan Maret 2018 sebanyak 174,450 turun menjadi 166,410 atau berkurang sebanyak 8,040 orang. Berkurangnya jumlah orang miskin perdesaan setidaknya didorong oleh tiga faktor, yakni inflasi umum dapat

dijaga pada level yang aman, beberapa harga komoditas pokok harganya stabil, dan nilai tukar petani meningkat. Antara gini rasio yang meningkat dan kemiskinan perdesaan menurun secara sederhana dimaknai bertentangan dengan teori yang dikembangkan oleh Bourguignon (2004), bahwa ketimpangan mempengaruhi kemiskinan, artinya bila ketimpangan distribusi pendapatan menurun maka kemiskinan pun menurun. Sementara yang terjadi di Gorontalo malahan sebaliknya, ketimpangan meningkat dan kemiskinan menurun. Ini sebuah fenomena yang bersifat anomali, dapat disimpulkan kedalam dua masalah pokok yang cukup krusial, yakni; 1) Kinerja makro ekonomi (pertumbuhan) tidak lagi relevan dengan ketimpangan dan kemiskinan, 2) Kinerja fiskal juga dapat dimaknai kurang memiliki efek yang baik terhadap ketimpangan dan kemiskinan di Gorontalo. Pada mulanya anggaran (APBD) Gorontalo yang rendah namun rata-rata pertumbuhan ekonomi lumayan tinggi, yang berefek terhadap gini rasio yang rendah, misalnya pada tahun 2002 nilai APBD Provinsi Gorontalo hanya sekitar Rp. 172 miliar, gini rasio sebesar 0,253. Pada tahun 2010 nilai total APBD sebesar Rp. 534 miliar, peningkatannya lebih dari dua kali lipat, dan tingkat gini rasio melonjak menjadi 0,431, dan pada tahun 2018 total nilai APBD sebanyak Rp. 1.815 triliun gini rasio 0,417. Jadi meningkatnya anggaran tidak serta merta memperbaiki distribusi pendapatan, belum lagi memperhitungkan Dana Desa yang masuk ke Gorontalo lumayan besar jumlahnya. Mencermati angka-angka tersebut sudah bisa diduga bahwa kenaikan APBD dan Dana Desa setiap tahun justru paling banyak menikmati kelompok masyarakat atas; sementara kelompok masyarakat kelas bawah yang jumlahnya besar kurang menikmati pembagian kue ekonomi Gorontalo.

Bilamana dilakukan

pengelompokan maka ada tiga kelompok distribusi pengeluaran penduduk Gorontalo, diantaranya; penduduk terbawah, penduduk menengah dan penduduk atas. Proporsi penduduk atas hanya sekitar 20 %, sedangkan proporsi penduduk menengah 40 % dan proporsi penduduk bawah 40 %. Memburuknya ketimpangan distribusi pendapatan di Gorontalo selama tahun 2018 karena didorong oleh tiga faktor; 1) Kenaikan rata-rata pengeluaran masyarakat tingkat bawah dan menengah terbilang lambat (rata-rata 8 %), sementara pengeluaran masyarakat kelas atas cukup cepat (14,48 %), artinya tingkat pendapatan masyarakat kelas atas kenaikannya pun cepat. 2) Tingkat pengeluaran masyarakat bawah hanya 4 %, untuk kelas menengah rata-rata tumbuh 12,09 % dan masyarakat atas mengalami lonjakan 18,80 %. 3) Kenaikan rata-rata pengeluaran masyarakat perkotaan untuk kelas bawah lebih cepat dibandingkan dengan kelompok masyarakat menengah namun lebih rendah dari kenaikan rata-rata kelas atas. Faktor kedua yang perlu diteliti lebih jauh dimana kenaikan rata-rata pengeluaran kelompok masyarakat atas diperdesaan lonjakannya tinggi sekali. Saya menduga "kelas elit" diperdesaan itu adalah mereka yang memegang struktur kekuasaan pemerintahan dan ekonomi, boleh jadi Dana Desa yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat atas ketimbang kelompok masyarakat bawah, asumsi ini tentu membutuhkan pembuktian secara empiris untuk dicarikan jalan keluar, sebab ketimpangan distribusi pendapatan akan melahirkan kecemburuan sosial, sementara ketimpangan wilayah akan mendorong terjadinya "separatis".

Penulis adalah
*Pengajar Fakultas
Ekonomi UNG